
MANAJEMEN LOGISTIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Logistic Management of the Regional Disaster Management Agency of South Sulawesi Province

Annisa Iskaputri¹, Amran Raazak², Muh. Alwy Arifin³

¹Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM Universitas Hasanuddin, annisaiskap@gmail.com

²Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM Universitas Hasanuddin, amran_razak34@yahoo.co.id

³Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM Universitas Hasanuddin, s2akk_unhas@yahoo.com

Alamat Korespondensi: Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Tamalanrea Kota Makassar Sulawesi Selatan

ARTICLE INFO

Article History:

Received August, 2nd, 2018

Revised form August, 10th, 2018

Accepted August, 15th, 2018

Published online February, 25th, 2020

Kata Kunci:

Manajemen;
logistik;
badan penanggulangan bencana;

Keywords:

Managemenet;
logistics;
disaster management agency;

ABSTRAK

Latar Belakang: Manajemen logistik penanggulangan bencana adalah suatu usaha pengaturan bahan baku logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri atas serangkaian proses, yaitu perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengangkutan, dan penerimaan di tujuan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode:** Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara mendalam disertai dengan pengamatan langsung (observasi). Informan dalam penelitian ini sebanyak enam orang yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu Kepala Bagian Kedaruratan dan Logistik, Kepala Seksi Logistik, Staf BPBD Provinsi Sulses dan Staf BPBD kabupaten/kota. **Hasil:** Berdasarkan hasil penelitian, bahwa manajemen logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari proses pengadaan logistik yang tidak tepat waktu, serta proses pengangkutan yang tidak mempertimbangkan jenis angkutan sesuai dengan logistik yang didistribusikan. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum terlaksana sebagaimana mestinya.

ABSTRACT

Background: Disaster management logistics management is an effort to regulate logistical raw materials in the implementation of disaster management which consists of a series of processes, namely planning, procurement, storage, distribution, transportation and acceptance at the destination. **Purpose:** This study aims to determine logistics management in the Regional Disaster Management Agency

of South Sulawesi Province. **Methods:** The type of research used in this study is a qualitative method through in-depth interviews. The informants in this study were six people who were selected through purposive sampling technique, namely the Head of the Emergency and Logistics Section, the Head of Logistics Section, the Staff of the Regional Disaster Management Agency of the Sulsel Province and the staff of the regional Disaster Management Agency in two regency. **Results:** Based on the results of the study, it can be concluded that the logistical management of the South Sulawesi Regional Disaster Management Agency has not been carried out properly. This can be seen from the planning process that is not in accordance with the needs so that there is excess logistics, inaccurate logistics procurement processes, and transportation processes that do not consider the type of transport in accordance with the logistics that are distributed. **Conclusion:** Based on the results of the study, it can be concluded that the logistical management of the South Sulawesi Regional Disaster Management Agency has not been carried out properly.

©2020 Hasanuddin Journal of Public Health.

Published by Faculty of Public Health, Hasanuddin University.

This is an open access article under CC-BY-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Secara geografis kepulauan Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana karena termasuk dalam wilayah *Pacific Ring of Fire* (deretan gunung berapi Pasifik) yang bentuknya melengkung dari utara Pulau Sumatera - Jawa – Nusa Tenggara hingga ke Sulawesi Utara. Kepulauan Indonesia juga terletak di pertemuan dua lempeng tektonik dunia dan dipengaruhi oleh 3 gerakan, yaitu Gerakan Sistem Sunda di bagian barat, Gerakan Sistem pinggir Asia Timur dan Gerakan Sirkum Australia. Kedua faktor tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap bencana. Maka dalam kurun waktu lima tahun, 1998 - 2004 terjadi 1.150 kali bencana.¹

Bencana alam geologi merupakan kejadian alam ekstrim yang diakibatkan oleh berbagai fenomena geologi dan geofisika. Aktivitas tektonik di permukaan bumi dapat menjadi salah satu penyebabnya, demikian halnya dengan aktivitas vulkanik dibawah permukaan bumi yang juga mungkin sampai di permukaan. Pemahaman mengenai mitigasi bencana alam geologi dan mitigasi hazard menjadi menarik dan mendesak untuk diteliti mengingat dampak yang ditimbulkan bencana tersebut dewasa ini. Kerugian jiwa, material, dan budaya merupakan aspek utama yang berisiko menanggung dampak bencana. Kesadaran tentang potensi bencana di Indonesia dan fakta ilmiah di sekitar bencana yang menimpa negara ini menjadi alasan utama perlunya dilakukan usaha - usaha ilmiah untuk mengatasinya. Peran aktif semua pihak yang terkait merupakan sikap terbaik yang diperlukan untuk menanggulangi masalah bencana.

Dilihat dari potensi bencana yang ada, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana (*hazard potency*) yang sangat tinggi. Beberapa potensi bencana yang ada antara lain adalah bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain-lain.

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di jazirah selatan Pulau Sulawesi, dengan luas 4.611.845 ha (42% dari luas seluruh Pulau Sulawesi) dan memiliki tingkat kepadatan penduduk sekitar 165 jiwa per km persegi. Keadaan geografis Provinsi Sulawesi Selatan cukup beragam karena daerah ini memiliki beberapa sungai, danau dan pegunungan. Jumlah sungai yang mengalir wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 65 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar berada di Kabupaten Luwu, yakni sebanyak 25 aliran sungai. Sedangkan sungai yang berada di Kabupaten Gowa dikendalikan oleh bendungan Bili-bili.²

Berdasarkan data BNPB tahun 2013, beberapa ancaman bencana ada di provinsi ini, antara lain banjir, gempa bumi, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, gagal teknologi, konflik sosial, epidemi dan wabah penyakit. Bencana menimbulkan dampak terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk, termasuk kesehatan. Salah satu permasalahan yang dihadapi setelah terjadi bencana adalah pelayanan kesehatan terhadap korban bencana. Untuk penanganan kesehatan korban bencana, berbagai piranti legal (peraturan, standar) telah dikeluarkan. Salah satunya adalah peraturan yang menyebutkan peran penting Puskesmas dalam penanggulangan bencana.³

Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang/ sektor lain. Bencana gempa bumi, banjir, longsor dan letusan gunung berapi, dalam jangka pendek dapat berdampak pada korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, kerusakan fasilitas kesehatan dan sistem penyediaan air.⁴ Timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang berakibat pada buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular.

Persediaan pangan yang tidak mencukupi juga merupakan awal dari proses terjadinya penurunan derajat kesehatan yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi secara langsung tingkat pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana. Pengungsian tempat tinggal (*shelter*) yang ada sering tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan daya tahan tubuh dan bila tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan masalah di bidang kesehatan. Sementara itu, pemberian pelayanan kesehatan pada kondisi bencana sering menemui banyak kendala akibat rusaknya fasilitas kesehatan, tidak memadainya jumlah dan jenis obat serta alat kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan dana operasional. Kondisi ini tentunya dapat menimbulkan dampak lebih buruk bila tidak segera ditangani.⁵

Manajemen *as working with and through individuals and groups to accomplish organizational goals* (sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi). Hersey dan Blanchard lebih menekankan bahwa definisi tersebut tidaklah dimaksudkan hanya untuk satu jenis organisasi saja, tetapi dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi tempat individu dan kelompok tersebut menggabungkan diri untuk mewujudkan tujuan bersama.⁶

Logistik dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi dari para supplier, diantara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para supplier dan kepada para pelanggan.⁷ Menurut Martin Christopher dalam buku manajemen logistik karya Ratih Hendayani, logistik adalah proses dari pengelolaan secara strategis dalam usaha perolehan, pergerakan, dan penyimpanan bagian material dan persediaan akhir, juga berhubungan dengan arus informasi, melalui organisasi dan jalur pemasarannya dalam beberapa cara untuk mendapatkan keuntungan tertentu di masa depan yang maksimal melalui ongkos pemenuhan pemesanan yang efektif.⁸

Logistik mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan bencana, terutama pada saat prabencana, kesiapsiagaan, dan respon penanganan bencana, untuk dapat memastikan tujuh tepat, yaitu: tepat jenis bantuan barang; tepat kuantitas; tepat kualitas; tepat sasaran; tepat waktu; tepat pelaporan; dan tepat biaya. Pengelolaan logistik yang efektif, efisien, dan andal menjadi faktor penting dalam penanggulangan bencana.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen logistik Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengangkutan, dan penerimaan di tujuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada 16 juli hingga 27 juli 2018. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* artinya informan yang dipilih adalah yang mengetahui permasalahan dengan jelas, untuk dapat menjadi sumber data yang baik serta mampu mengemukakan pendapat secara baik dan benar. Informan sebanyak enam orang yang terdiri atas: 1 orang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, 1 orang Kepala Seksi Logistik, 2 orang staf Seksi Logistik, dan 2 orang staf BPBD kabupaten/kota.

HASIL

Perencanaan kebutuhan logistik, telah terbentuk tim perencanaan yang dibawah langsung oleh kepala seksi logistik untuk melakukan inventarisasi logistik. Selain itu, BPBD juga telah memiliki rencana operasional untuk tahun depan yang disesuaikan dengan pemakaian logistic tahun-tahun

sebelumnya. Pemakaian logistik per tahun ini dapat diketahui dengan melihat berita acara serah terima logistik sebelumnya ataupun dengan melihat kondisi geografis tiap daerah.

“Jadi kita itu ada rapat koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota sebelum mengajukan ke BNPB, nanti hasilnya kita rangkum baru dilihat apa-apa yang dibutuhkan”. (AU, 58 tahun, Kabid Kedaruratan dan Logistik)

“Ada tim perencanaan, saya sendiri kasi logistik sebagai penanggungjawab”. (AI, 54 tahun, Kepala Seksi Logistik BPBD Provinsi Sulsel)

“Sesuai sama permintaan dari daerah, dilihat juga kondisi alamnya”. (HI, 33 tahun, Staf BPBD Provinsi Sulsel)

”Selama ini dikasih dari BNPB sesuai permintaan, tapi biasanya tidak tersalurkan ke kabupaten karena memang tidak ada permintaan. Jadi biasanya ada yang kadaluarsa, terutama pada makanan”. (HI, 33 tahun, Staf BPBD Provinsi Sulsel)

Metode pengadaan logistik di BPBD Provinsi Sulawesi Selatan ada tiga. Pertama, pengadaan dari BNPB setelah dilakukan rapat inventarisasi kebutuhan. Kedua, pengadaan oleh BPBD sendiri menggunakan APBD. Ketiga, berupa sumbangsih langsung dari masyarakat.

“Pengadaannya itu jarang tepat waktu, karena di pusat memang lama proses seleksinya. Jadi tidak langsung permintaan dari provinsi diterima begitu saja, pake prosedur juga”. (AU, 58 tahun, Kabid Kedaruratan dan Logistik)

“Pertama, ada bantuan dari BNPB ke provinsi. Kedua, kita pengadaan sendiri menggunakan APBD. Ketiga, ada sumbangan dari masyarakat”. (AI, 54 tahun, Kepala Seksi Logistik BPBD Provinsi Sulsel)

Proses pengadaan ini dilakukan setelah rapat inventarisasi kebutuhan. Setelah distribusi logistik dari BNPB telah sampai di BPBD, dilakukan pemeriksaan sebelum penyimpanan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mencocokkan nama dan jumlah barang, serta jangka waktu layak pakai.

”Dicek satu persatu. Dicocokkan ki nama item sama jumlahnya sebelum masuk ke gudang”. (HI, 33 tahun, Staf BPBD Provinsi Sulsel)

Fungsi penyimpanan adalah kualitas barang dapat dipertahankan, barang terhindar dari kerusakan, pencarian barang yang lebih mudah dan barang yang aman dari pencuri.

“Tidak ada perawatannya, kan yang mau kadaluarsa pasti sudah didistribusi duluan”. (HA, 59 tahun, Staf BPBD) “Diatur first in first out toh, jadi yang datang lebih dulu diletakkan di depan”. (AI, 54 tahun, Kepala Seksi Logistik)

“Diatur sesuai jenisnya. Jadi yang makanan sama makanan juga. Kalau alat berat itu dipisah juga”. (HA, 59 tahun, Staf BPBD Provinsi Sulsel)

Proses pencatatan logistik diperbaharui setiap ada tambahan logistik. Pencatatan ini dilakukan secara manual maupun online. BPBD Provinsi Sulsel telah mengembangkan sebuah sistem informasi online yang dapat diakses melalui website untuk mengetahui stok logistik di penyimpanan.

“Dicatat manual. Tapi sekarang sudah ada system online, jadi setiap stok yang baru itu langsung diinput”. (HI, 33 tahun, Staf BPBD Provinsi Sulsel)

Sementara untuk sarana dan prasarana penyimpanan dianggap belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari luasnya gudang yang belum mampu menampung keseluruhan logistik, serta belum terdapat sarana untuk menjamin kualitas barang yang disimpan.

“Masih sempit itu gudang, jadi begitumi. Bisa dianggap belum memadai”. (HA, 59 tahun, Staf BPBD Provinsi Sulsel)

Proses pendistribusian logistik dilakukan setelah logistik tersedia, dengan memperhatikan permintaan dari tiap-tiap daerah dan jumlah logistik yang tersedia.

”Disalurkan ke daerah tergantung permintaannya. Tapi kalau ada yang permintaannya tidak dapat dipenuhi, kita kasi secukupnya saja”. (AU, 58 tahun, Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Provinsi Sulsel)

“Tergantung tingkat kerawanan bencana di tiap daerah”. (HI, 33 tahun, Staf BPBD Provinsi Sulsel)

Pengangkutan mencakup proses untuk menyalurkan logistik dari BPBD Provinsi ke BPBD kabupaten/kota. Dalam pemilihan jenis angkutan yang akan digunakan, sebaiknya digunakan pertimbangan untuk menjaga keamanan dan keutuhan logistik yang disalurkan.

“Tidak adaji cara khusus. Cukup diatur saja supaya tidak ada rusak, misalnya yang agak ringan taroh di atas. Biasa pake mobil untuk angkut logistik memang dari sini. Tapi kadang juga mereka sendiri dari daerah yang datang ambil langsung, jadi terserah mereka ji angkutannya”. (HA, 59 tahun, Staf BPBD Provinsi Sulsel)

Terkait penerimaan di tempat tujuan, hal-hal yang harus dilakukan adalah mencocokkan data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima.

“Iya, dicocokkan dulu barang sama datanya”. (HA, 59 tahun, Staf BPBD Provinsi Sulsel)

Selain itu, juga harus mengecek kembali jenis, jumlah, berat, dan kondisi barang, serta membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan.

PEMBAHASAN

Perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan menkoordinasikan

seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.¹⁰ Perencanaan/inventarisasi kebutuhan di BPBD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilakukan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya tim perencanaan logistik yang berfokus pada inventarisasi kebutuhan. Selain itu, tim perencanaan juga telah memiliki rencana operasional untuk tahun yang akan datang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Instalasi Farmasi Kabupaten RSUD Kabupaten Pangkep yang mengatakan bahwa instalasi farmasi menggunakan rencana operasional yang menjadi panutan dalam melaksanakan manajemen logistik pengelolaan obat dan disusun menjadi rencana kerja Instalasi Farmasi RSUD Kabupaten Pangkep.¹¹ Namun, meskipun semua langkah tersebut telah direalisasikan dalam proses perencanaan, hasilnya belum dapat dikatakan efektif karena perencanaan logistik belum sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan oleh pendistribusian yang tidak sesuai dengan rapat inventarisasi kebutuhan dengan kabupaten/kota dalam pelaksanaannya sehingga banyak terjadi kesalahan dalam perhitungan kebutuhan logistik.

Pengadaan adalah semua kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisiensi. Metode pengadaan dapat berupa pembelian, pembuatan, perbaikan, peminjaman, penukaran dan penghibahan.¹² Metode pengadaan/penerimaan yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan ada dua. Pertama, pengadaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disesuaikan dengan rapat inventarisasi kebutuhan tingkat nasional. Kedua, pengadaan sendiri oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang situasional. Artinya, pengadaan ini hanya dilakukan apabila permintaan yang diajukan BNPB tidak terpenuhi sesuai perencanaan. Ketiga, dapat berupa sumbangsih dari masyarakat yang bersifat sukarela.

Penentuan waktu pengadaan barang dari BNPB dilaksanakan setelah rapat inventarisasi kebutuhan. Pengadaan barang ini belum efektif karena tidak tepat waktu sesuai perencanaan. Hal ini disebabkan oleh proses penyediaan logistik di internal BNPB memakan waktu yang cukup lama sehingga proses pendistribusian ke provinsi juga terhambat. Pada saat penerimaan logistik, dilakukan pemeriksaan sebelum penyimpanan/pegudangan, dengan cara mencocokkan nama dan jumlah barang, serta jangka waktu layak pakai. Khususnya pada makanan, harus memiliki jangka waktu minimal satu tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di IFRS Kabupaten Pangkep yang mnegatakan bahwa proses pemeriksaan dan penerimaan ditekankan pada kondisi fisik, expired, kesesuaian jumlah dan jenis barang yang dipesan.¹¹

Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di tempat penyimpanan.¹³ Dalam hal pergudangan dan penyimpanan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pengaturan tata ruang penyimpanan, keamanan, dan kualitas logistik yang disimpan. BPBD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengaturan tata ruang penyimpanan dengan seadanya, tidak dilakukan perawatan untuk menjaga

kualitas logistik di dalam penyimpanan. Hal ini disebabkan oleh sarana dan pra sarana yang kurang memadai untuk melakukan penyimpanan, terutama ukuran gudang yang belum cukup luas untuk menampung seluruh stok logistik. Penyimpanan dilakukan dengan metode *FIFO (first in first out)*, artinya logistik yang datang terlebih dahulu juga akan didistribusikan terlebih dahulu. Untuk proses pencatatannya, telah dikembangkan sistem informasi online untuk melakukan penginputan setiap ada penambahan stok. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Cina Kabupaten Bone yang mengatakan bahwa pengaturan penyimpanan logistik obat dikelompokkan berdasarkan jenisnya untuk memudahkan pencarian, pengawasan, pengendalian, dan penerapan prosedur FIFO.¹⁴

Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung: yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana.¹⁵ Proses pendistribusian logistik BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan setelah stok dari BNPB telah tersedia, dengan memperhatikan permintaan tiap daerah. Penentuan lokasi pendistribusian ini didasarkan pada tingkat kerawanan bencana di seluruh kabupaten/kota. Sejauh ini, proses pendistribusian dapat dikatakan efektif dan tidak memiliki kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan data perencanaan pendistribusian, maka dilaksanakan pengangkutan. Data yang dibutuhkan untuk pengangkutan adalah: jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima. Penerimaan oleh penanggung jawab pengangkutan disertai dengan berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut.¹⁵ BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengangkutan belum dapat dikatakan efektif karena melihat kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dari keamanan dan keutuhan logistik yang tidak terjamin selama proses pengangkutannya, serta pemilihan angkutan yang tidak mempertimbangkan jenis logistik yang akan didistribusikan. Bahkan tugas pengangkutan ini diserahkan langsung ke BPBD kabupaten /kota dalam pelaksanaannya. Penerimaan di tempat tujuan harus memperhatikan data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima. Hal ini telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, juga telah membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan logistik.

KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Proses perencanaan manajemen logistik BPBD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Hal ini dilihat dari terbentuknya tim perencanaan dan rencana operasional; Proses pengadaan/penerimaan logistik BPBD Provinsi Sulawesi Selatan tidak tepat waktu sehingga menghambat proses pendistribusian; Proses pergudangan/penyimpanan logistik BPBD Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode FIFO, namun belum dapat dikatakan

maksimal, mengingat ruang penyimpanan yang kurang efektif; Proses pendistribusian logistik BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mempertimbangkan kerawanan bencana tiap daerah; Proses pengangkutan logistik BPBD Provinsi Sulawesi Selatan tidak mempertimbangkan jenis angkutan yang digunakan, serta memberikan tanggungjawab pengangkutan ke kabupaten/kota yang bersangkutan; Proses penerimaan di tujuan logistik BPBD Provinsi Sulawesi Selatan memperhatikan data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima. Oleh karena itu, disarankan kepada pihak BPBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk merealisasikan manajemen logistik penanggulangan bencana sesuai Perka BNPB No. 13 Tahun 2008.

REFERENSI

1. Pranolo, A. Identifikasi Tingkat Risiko Bencana Gempa Bumi Serta Arahan Mitigasi Bencana di Wilayah Kota Bengkulu. [Skripsi]. Bandung: Universitas Pasundan; 2013.
2. BNPB. Indeks Risiko Bencana Indonesia 2013. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 2014.
3. Depkes. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 145/Menkes/SK/1/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan. Jakarta : Departemen Kesehatan RI; 2007.
4. Pan American Health Organization. Bencana Alam: Perlindungan Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2000.
5. Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Sekretariat Jenderal Depkes. Standar Minimal Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2001.
6. Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard. Management and Organizational Behavior. Englewood Cliffs: NJ Prentice-Hall; 1996.
7. Bowersox, Donald J. Manajemen Logistik Edisi I. Jakarta: PT Bumi aksara; 2002.
8. Hendayani, Ratih. Mari Berkenalan dengan Manajemen Logistik. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta; 2011.
9. Zaroni. Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana. [Online: Update 10 Februari 2017]. Available at: <http://supplychainindonesia.com/new/manajemen-logistik-penanggulangan-bencana-bagian-1/>. [Diakses pada 9 Maret 2018].
10. Robbins, Stephen dan Coulter, Mary. Manajemen, Jakarta: Gramedia; 2002.
11. Nurlinda. Studi Tentang Manajemen Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2016. [Skripsi]. Makassar: Universitas Hasanuddin; 2013.
12. Subagya, M.S. Manajemen logistik. Cetakan Keempat. Jakarta: Haji Masagung; 1994.

13. Seto, S. Manajemen Farmasi Surabaya. Airlangga University Press; 2008.
14. Amri, Syamsoel. Studi Manajemen Pengelolaan Obat di Puskesmas Cina Kabupaten Bone Tahun 2014 [Skripsi]. Makassar: Universitas Hasanuddin; 2014.
15. Perka BNPB No 13 Tahun 2008. Tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 2008.